

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA DODAP KECAMATAN TUTUYAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

DORTEA NOVA LOBBU
FLORENCE DAICY J. LENGKONG
JERICHO D. POMBENGI

Abstract : This research aims to know the role of Government in development in the village of Dodap sub-district of Tutuyan. This study uses qualitative methods with selected informants consisted of the village head/old/Sangadi Law, Secretary of the village, head of Development Affairs, head of BPD, head of Dusun, and local communities. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. Qualitative data were analyzed with descriptive narrative supported by primary and secondary data. The results showed that the associated role of Government in development in the village of Dodap sub-district of Tutuyan has shown a fairly good results, in terms of making new innovations in development, interaction and relationship building with community through socialization and the construction. It can be seen from the construction work training Hall, a cooperative village, smart village also worship facilities, and medical facilities and much more. In addition to counseling groups making the villagers by giving an explanation of the development of physical and nonphysical. Similarly, the ability of the Government in managing and manage natural resources is already fairly well with how to increase self-reliance, dig the creativity of local resource of the village in order to create a more productive village in processing the results of the source natural resources in a sustainable way. In addition to that Government's role as a pioneer in the development of a Government which is also quite good also down directly to a location without intermediaries or without connecting, media and Government directly become a motivator in the work programme, the givers of guidance and direction for the community in participating actively in every development and also the Government coordinating direct factors that can push the pace of development and the granting of aid in the community. The development process undertaken by the Government in the village of Dodap is quite good starts with creating a strategy and work plan according the decision of the team work of the village Dodap and align development village through the efforts against policies in building villagers in the autonomous region. But in terms of Government decision making is still impressed hesitation, lack of consistency with the existing development planning and still less interaction with the community so that less Government know the existing local resources and any development process so as to target

Key Words: The Role Of Government, Development, Development

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 2014 tentang Desa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa suatu pembangunan secara besar-besaran dari masyarakat desa masih menemui kesulitan dan kendala yang disebabkan oleh keterbatasan dana dan sumber daya manusia yang terbatas untuk menjangkau daerah pedesaan secara keseluruhan, sehingga pembangunan desa sedapat mungkin harus direalisasikan dengan bantuan minimal dari pemerintah. Dengan kondisi seperti itu maka partisipasi masyarakat desa itu sendiri menjadi sangat penting dan menentukan keberhasilan pembangunan desa.

Hal yang menarik dari sejauh pengamatan penulis di Desa Dodap Kec Tutuyan terlihat bahwa pemerintah desa belum maksimal dalam melakukan tugasnya sebagai pemerintah desa, hal itu dikarenakan pemerintah desa pada umumnya tidak

mempunyai kompetensi atau kemampuan yang memadai untuk dapat menggerakkan dan mendorong partisipasi masyarakat desa yang mereka pimpin dalam pembangunan desa. Pemerintah desa umumnya berpendidikan formal yang rendah, tidak punya pelatihan-pelatihan keterampilan yang memadai, dan kurang memiliki pengalaman yang cukup dibidang pemerintahan dan pembangunan.

Dari kekurangan itulah yang menyebabkan kurangnya peranan pemerintah Desa Dodap Kecamatan Tutuyan selaku aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan tugasnya terutama untuk menyiapkan bahan dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan yang hasilnya masih minim atau belum terlaksana secara optimal. Masih lemahnya peranan pemerintah desa untuk mengajak atau menghimbau masyarakat agar ikut berpartisipasi menyampaikan pendapat dalam pengambilan keputusan menyangkut kepentingan masyarakat terkait dalam pelaksanaan pembangunan di Desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Peranan

Kata peranan ini sebenarnya menunjukan pada aktifitas yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu kelompok masyarakat. Apabila seseorang tidak melakukan apa-apa dalam suatu kelompok tersebut maka ia tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagai anggota kelompok dalam organisasi. Secara etimologis kata peranan berdasar dari kata peran yang artinya : pemain sandiwara, tukang lawak. Kata "Peran" ini diberi akhiran "an" maka menjadi peranan yang artinya sesuatu yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa (Poerwadarminta 1985 : 735). Dengan demikian kata peran berarti sesuatu berupa orang, benda atau barang yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa.

Menurut Soekanto (2003: 243) peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya

maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat

Konsep Pemerintah Desa

Dalam pemerintah daerah Kabupaten/Kota di bentuk pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa (SEKDES) dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan, pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa dengan memperhatikan asal usul dan prakarsa masyarakat pemerintah desa bersama BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA).

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah desa, menurut Nurcholli (2005 : 138) pemerintah mempunyai tugas pokok:

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
- b. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Dari tugas pokok tersebut lahir fungsi pemerintah desa yang berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi pemerintah desa merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu didalam situasi sosial suatu kelompok masyarakat (Rivai, 2004 : 53)

Konsep Pembangunan Desa

Menurut S P. Siagian (1987:2) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa/ nation building. Sementara Riyono Pratikno (1979:119) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu jenis perubahan sosial dimana diperkenalkan berbagai gagasan baru ke dalam sistem sosial untuk meningkatkan penghasilan perkapita serta standar hidup.

Definisi pembangunan desa atau pembangunan masyarakat desa yang telah diterima secara luas dan dijadikan landasan dalam pembangunan desa dibanyak negara-negara sedang berkembang, adalah yang ditetapkan oleh perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1956, yang berbunyi sebagai berikut: pembangunan masyarakat desa adalah suatu proses, baik usaha-usaha masyarakat yang bersangkutan yang diambil berdasarkan prakarsa sendiri, maupun kegiatan pemerintah, dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan masyarakat dan mengintegrasikan kehidupan masyarakat-masyarakat itu kedalam kehidupan bangsa, dan memampukan mereka untuk memberi sumbangan sepenuhnya demi kemajuan nasional. Dalam definisi tersebut kemudian dijelaskan bahwa, proses pembangunan desa tersebut meliputi dua elemen dasar, yaitu pertama partisipasi masyarakat itu sendiri dalam rangka usaha mereka memperbaiki taraf hidup mereka sedapat-dapatnya berdasarkan kekuatan atau prakarsa sendiri, dan

keduabantuan dan pelayanan teknis yang bermaksud membangkitkan prakarsa, tekad untuk menolong diri sendiri dan kesediaan membantu orang lain, dari pemerintah. Program tersebut biasanya menyangkut kepentingan umum masyarakat setempat (PBB, dalam, Taliziduhu, 1997).

Konsepsi pembangunan desa yang di laksanakan di Indonesia sejak awal pembangunan berencana tidak jauh berbeda dengan pengertian yang dikemukakan oleh PBB tersebut di atas. Dalam Undang-Undang Nomor 85 Tahun 1958 tentang Repelita 1956-1960 disebutkan bahwa tujuan pembangunan masyarakat desa adalah meningkatkan taraf penghidupan masyarakat desa dengan jalan melaksanakan pembangunan yang integral dari pada masyarakat desa, berdasarkan asas kekuatan sendiri dari pada masyarakat desa serta atas pemufakatan bersama antara anggota-anggota masyarakat desa dengan bimbingan serta bantuan pemerintah yang bertindak sebagai suatu keseluruhan dalam rangka kebijaksanaan umum yang sama.

Peranan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa

Aparatur pemerintah desa sebagai pemimpin juga sebagai penyelenggara pembangunan harus memiliki tanggung jawab atas perubahan yang akan terjadi, baik perubahan yang terjadi didalam masyarakat maupun perubahan sosial kemasyarakatan. Untuk itu pemerintah desa selaku kepala pemerintahan dalam usaha mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut harus memiliki kemampuan untuk berfikir dan berbuat secara rasional dalam mengambil keputusan yang akan terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Disamping itu keputusan yang nantinya kan diambil tanpa memberatkan rakyat banyak. Kemudian Secara lebih jelas dan detail, peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh Siagian (2000: 142-150) yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator,

innovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih rinci peran tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan yang persuasif dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.
- b. Inovator, dalam memainkan peran selaku innovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (legitimacy) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya karena “menang” dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Tiga hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah, penerapan inovasi dilakukan dilingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konsepsional, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.
- c. Modernisator, melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan

demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.

- d. Pelopor, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (role model) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.
- e. Pelaksana sendiri, meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai suatu jenis penelitian deskriptif. Menurut Schlegel (dalam Sugiono, 1992), penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti.

Fokus Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka fokus penelitian ini adalah peran pemerintah dalam pembangunan desa. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu. (Siagian 2000: 142-150).

Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah, bersumber dari :

Informan

Informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Desa/Hukum Tua/Sangadi
2. Sekertaris Desa
3. Kepala Urusan Pembangunan
4. Kepala BPD
5. Kepala Dusu
6. Masyarakat Setempat

Situasi sosial yang dimaksudkan dalam penelitian ini, seperti tempat penelitian, pelaku (orang-orang) serta aktifitas yang diamati secara mendalam oleh peneliti dalam mengumpulkan data.

Dokumen yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh atau yang diambil dalam proses penelitian. Peneliti menggunakan kamera foto untuk mengambil data dalam bentuk audio visual, baik dalam bentuk foto ataupun dalam bentuk rekaman.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: Wawancara, Observasi, Teknik dokumentasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara dari 10 orang responden atau informan terhadap pertanyaan seputar Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Dodap Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Stabilisator :

Proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan di Desa Dodap menurut Kepala Desa beserta jajarannya yaitu dengan memberikan penjelasan tentang pembangunan fisik dan nonfisik serta penjelasan tentang menanggulangi faktor-faktor penghambat pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan.. Selain itu sosialisasi kerja dan program kerja yang terstruktur mengenai pembangunan jangka pendek,

jangka menengah dan jangka panjang juga dilakukan sebagai salah satu bentuk pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang ekonomi, hukum, agama, dan kesehatan serta sebagai usaha untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan. Sedangkan hal yang sama diungkapkan masyarakat. Bahwasanya proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan di Desa Dodap dimulai dari aparat desa, perangkat-perangkat desa bekerja sama dengan tokoh-tokoh adat dan jejaring lainnya serta masyarakat bekerja sama dalam perencanaan pembangunan. Selain itu Membuat kelompok penyuluhan oleh pemerintah untuk masyarakat desa, menciptakan komunikasi yang lancar dengan masyarakat. Hal yang disampaikan dalam sosialisasi juga sama antar lain sosialisasi kerja dalam rangka proses pembangunan Desa Dodap dengan pola yang terarah dan mengutamakan kepentingan masyarakat, memberikan penjelasan tentang fasilitas desa dan cara pemanfaatan sumber daya desa. Namun beberapa masyarakat menilai pemerintah juga masih terkesan sangat ragu-ragu dalam hal pengambilan keputusan dan kurangnya interksi dengan masyarakat desa karena program kerja yang tidak terstruktur.

2. Inovator :

Inovasi-inovasi yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan di Desa Dodap antara lain : mengadakan Smart Village (Kampung Cerdas), meningkatkan potensi positif desa, merencanakan rencana untuk mengatasi problematika urbanisasi, dan perencanaan focus pengembangan hal-hal tradisional seperti bergotong royong, pembangunan (rencana) balai latihan kerja, menyediakan operator untuk pelatihan tenaga kerja, dan rencana perluasan lokasi lahan untuk tanaman palawija, mendirikan koperasi desa sederhana untuk membantu ekonomi

masyarakat, pemberian bantuan fasilitas ibadah yang merata, dan pengadaan tim kesehatan desa serta bidan desa, rencana pembuatan tugu perbatasan dengan desa lain dan pembuatan sistem keamanan desa yang dibentuk dalam satu tim guna keamanan dan ketertiban desa, pengadaan bahan-bahan material untuk pembuatan jalan dan pengadaan kendaraan pembantu namun ini masih dalam rencana, renovasi jalan lingkar desa menjadi jalan paving dan penambahan lahan untuk perkebunan, rehabilitasi gedung sekolah dasar, balai desa, pembuatan pos keamanan lingkungan disetiap lingkungan walaupun hanya sederhana, Pemanfaatan SDA, yang ada di Desa Dodap, Pembangunan sarana dan prasarana yang di butuhkan, pelaksanaan kegiatan yang memicu masyarakat meningkatkan keahliannya, Membuat kelompok TANI, Melakukan pembersihan Desa setiap hari sabtu.

3. Modernisator :

Kemampuan pemerintah dalam memanaj dan mengelolah kekayaan alam yaitu dengan cara meningkatkan kemandirian disektor ekonomi serta menggali kreativitas sumber daya local desa guna menciptakan desa yang lebih produktif dalam mengolah hasil-hasil sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain itu mendaur ulang sumber daya yang sudah tidak digunakan atau yang turun drastis dipasaran kemudian dikembangkan dengan menggunakan sarana dan prasarana sehingga kembali menjadi sumber daya yang baru dan berkualitas. Memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam berbagai bidang. Hal yang hampir sama ditambahkan oleh masyarakat yang mengatakan pemerintah dalam memanaj dan mengelolah kekayaan alam di mulai dengan membuat peraturan yang tegas untuk melindungi sumber daya alam yang ada serta mengajak dan bimbingan masyarakat untuk kembali membudidayakan hasil-hasil bumi pada

Desa Dodap tak hanya itu salah satu upaya pemerintah juga antara lain memberikan bantuan berupa buku panduan kerja dan cara pemanfaatan sumber daya alam. Namun beberapa masyarakat juga menilai pemerintah masih tidak mampu mengenal kelebihan-kelebihan masyarakat baik sumber daya manusia ataupun sumber daya alamnya.

4. Pelopor :

Peran pemerintah sebagai pelopor dalam pembangunan yaitu diawali dengan investasi yang dilakukan dibidang-bidang yang dapat meningkatkan ekonomi desa serta penentuan arah pembangunan. Pemerintah juga turun langsung ke lokasi tanpa perantara atau tanpa media yang menghubungkan, dan pemerintah langsung menjadi motivator dalam program kerja, pemberi bimbingan dan arahan bagi masyarakat dalam berpartisipasi aktif disetiap pembangunan dan juga pemerintah mengkoordinir langsung faktor-faktor yang dapat mendorong laju perkembangan pembangunan dan pemberian bantuan pada masyarakat. Dari sudut pandang masyarakat peran pemerintah sebagai pelopor dalam pembangunan Desa Dodap sebagai memberikan bantuan kepada masyarakat berupa pelatihan tenaga kerja, alat pengeras suara agar dapat memanggil masyarakat untuk melaksanakan kerja bakti melalui alat tersebut. Namun disisi lain beberapa masyarakat berpendapat peran pemerinta sebagai pelopor masih kurang baik, tidak adanya konsistensi dengan perencanaan pembangunan yang telah ada sejak berjalannya perkembangan infrastruktur di desa masih 55% dan hingga kini masih sama. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan pendanaan serta kurangnya support dari aparaturnya.

5. Pelaksana Sendiri :

proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di Desa Dodap dimulai dengan membuat strategi dan rencana kerja sesuai

keputusan tim kerja Desa Dodap dan menyelaraskan pembangunan desa melalui upaya-upaya terhadap kebijakan dalam membangun masyarakat desa di era otonomi daerah. kemudian melakukan pembangunan sarana dan prasarana desa serta infrastruktur desa. Selain itu pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan hidup juga ditingkatkan. Proses pembangunan yang dilakukan pemerintah di Desa Dodap dinilai masyarakat dimulai dari hal kecil seperti pembuatan saluran air desa dari mata air pegunungan walaupun dengan peralatan sederhana dengan mengikuti alur kerja pemerintah berdasarkan hasil rapat kemudian pembangunan terus dilakukan secara bertahap dengan lebih mengutamakan keahlian masyarakat untuk dikolaborasikan dengan sarana apa yang perlu di bangun pada Desa Dodap. Namun beberapa masyarakat menilai juga proses pembangunan belum mengenai sarannya dan kurangnya keterlibatan pemerintah desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Tujuan penelitian untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam pembangunan di Desa Dodap. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Stabilisator

Proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan di Desa Dodap cukup baik dimulai dari aparatur desa, perangkat-perangkat desa bekerja sama dengan tokoh-tokoh adat dan jejaring lainnya serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Selain itu Membuat kelompok penyuluhan untuk masyarakat desa dengan memberikan penjelasan tentang pembangunan fisik dan nonfisik serta penjelasan tentang cara menanggulangi faktor-faktor penghambat pembangunan desa, Selain itu sosialisasi

kerja dan program kerja yang terstruktur mengenai pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang juga dilakukan sebagai salah satu bentuk pembinaan terhadap masyarakat. Namun dalam hal pengambilan keputusan pemerintah masih terkesan ragu-ragu dan masih kurang interaksi dengan masyarakat.

2. Inovator

Inovasi-inovasi baru yang dibuat pemerintah antara lain pembangunan infrastruktur desa yang berguna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa dan sumber dayanya seperti pembangunan balai pelatihan kerja, koperasi desa, smart village, dan fasilitas ibadah juga fasilitas medis. Tak hanya itu pemerintah juga melakukan inovasi dalam mengatasi persoalan sosial dan pengembangan hal-hal tradisional di desa seperti mengadakan program untuk mengatasi urbanisasi dan menerapkan sistem keamanan desa untuk menjaga ketertiban sosial serta mengajarkan kepada masyarakat arti kebersamaan dan gotong royong.

3. Modernisator

kemampuan pemerintah dalam memanaj dan mengelolah kekayaan alam sudah cukup baik yaitu dengan cara meningkatkan kemandirian, menggali kreativitas sumber daya local desa guna menciptakan desa yang lebih produktif dalam mengolah hasil-hasil sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain itu mendaur ulang sumber daya yang sudah tidak digunakan atau yang turun drastis dipasaran kemudian dikembangkan dengan menggunakan sarana dan prasarana sehingga kembali menjadi sumber daya yang baru dan berkualitas. Memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam berbagai bidang. Selain itu membuat peraturan yang tegas untuk melindungi sumber daya alam yang ada serta mengajak dan bimbingan masyarakat

untuk kembali membudidayakan hasil-hasil bumi pada Desa Dodap.

4. Pelopor

peran pemerintah sebagai pelopor dalam pembangunan desa sudah cukup baik. Pemerintah berperan sebagai investasi yang dilakukan dibidang-bidang yang dapat meningkatkan ekonomi desa serta penentuan arah pembangunan. Pemerintah juga turun langsung ke lokasi tanpa perantara atau tanpa media yang menghubungkan, dan pemerintah langsung menjadi motivator dalam program kerja, pemberi bimbingan dan arahan bagi masyarakat dalam berpartisipasi aktif disetiap pembangunan dan juga pemerintah mengkoordinir langsung faktor-faktor yang dapat mendorong laju perkembangan pembangunan dan pemberian bantuan pada masyarakat. Namun disisi lain beberapa masyarakat berpendapat peran pemerintah sebagai pelopor masih kurang baik, tidak adanya konsistensi dengan perencanaan pembangunan yang telah ada sejak berjalannya perkembangan infrastruktur di desa masih 55% dan hingga kini masih sama.

5. Pelaksana sendiri

Peran pemerintah sebagai pelaksana sendiri berkenaan dengan proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di Desa Dodap cukup baik dimulai dengan membuat strategi dan rencana kerja sesuai keputusan tim kerja Desa Dodap dan menyelaraskan pembangunan desa melalui upaya-upaya terhadap kebijakan dalam membangun masyarakat desa di era otonomi daerah. Kemudian melakukan pembangunan sarana dan prasarana desa serta infrastruktur desa yang dikolaborasi dengan kemampuan warga desa. Selain itu pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan hidup juga ditingkatkan. Namun beberapa masyarakat menilai juga proses pembangunan belum mengenai

sasarannya dan kurangnya keterlibatan pemerintah desa.

Saran

Bertolak dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Desa Dodap, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Stabilisator :

Untuk peran stabilisator yang berkenaan dengan sosialisasi serta pendekatan terhadap masyarakat harusnya lebih ditingkatkan, kalau bisa pembuatan kotak saran dan kritik diadakan. Konsisten dan sikap tegas harus ditunjukkan sebagai pemerintah dalam hal ini aparat desa agar terkesan tidak ada keraguan dalam mengambil sikap dan kebijakan.

2. Inovator

Inovasi-inovasinya harus lebih ditambahkan, kalau bisa libatkan peran teknologi didalamnya.

3. Modernisator

Pemerintah harus lebih maksimal lagi menggali potensi sumber daya yang ada di Desa Dodap terutama keterampilan masyarakat dan sumber daya local yang menjadi unggulan disana. Kenali dengan lebih dekat kepada masyarakat agar dapat mengetahui potensi apa yang ada.

4. Pelopor

Konsistensi dan sikap bertanggung jawab serta peduli terhadap keadaan masyarakat harus ditingkatkan dengan melaksanakan tugas dan kerja dengan prima. Kalau perlu sanksi keras harus dikenakan buat aparat desa yang tidak bertanggung jawab.

5. Pelaksana sendiri

Pemerintah harus lebih membuka diri dan merima saran dan masukan guna untuk perumusan kembali sasaran dan tujuan pembangunan seperti apa yang diinginkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Nurcholis, H. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.

- Poerwadarminta, S. 1990. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia.
- Rivai, V. 2004. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siagian, S.P. 1978. *Manajemen*. Yogyakarta: Liberty.
- Siagian. 2006. *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, dan Strategi)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Soekanto, S. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Taliziduhu, N. 1997. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Bina Aksara.

Sumber Lain :

- Undang-Undang Nomor 85 Tahun 1958 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960 (LNRI No. 161, Th. 1958, TLN No. 1689)
- Undang-undang Nomor 4 tahun 2014 tentang Desa.